



EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2021-2024

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkulu Tengah**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 memuat capaian kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2024, faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja Perangkat Daerah serta rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan kinerja serta penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah periode berikutnya. Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) juga memuat hasil-hasil dari perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan hasil pemetaan terhadap perubahan numenklatur dan kodifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan sepanjang tahun pmutakhiran.

Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi dimaksudkan guna memotret keberhasilan sekaligus permasalahan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 serta hal-hal yang menjadi perhatian untuk mendapatkan solusi perbaikan dengan terwujudnya

perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Diharapkan laporan evaluasi ini sebagai titik pertimbangan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis periode berikutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Evaluasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024, saran dan masukan diterima sebagai bahan masukan perbaikan dokumen.



Bengkalis, 25 Oktober 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis

SALMAN ALFARISI, S.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820519 201102 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	Iv	
DAFTAR GAMBAR	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS AKHIR PERIODE	9
	2.1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra	9
	2.2. Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Yang Dijadikan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	11
	2.3. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra	19
	2.4. Catatan Perbaikan Terhadap Perumusan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	31
BAB III	FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	52
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	54
	4.1 Kesimpulan	54
	4.2 Rekomendasi	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Checklist</i> Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Periode Renstra 2021-2024 (Formulir E.73)	11
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Yang Dijadikan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2021-2024	14
Tabel 2.3	Matrik Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	18
Tabel 2.4	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2021-2024 (Formulir E.80)	20
Tabel 2.5	Matrik Capaian Program	27
Tabel 2.6	Rincian Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	32
Tabel 2.7	Hasil Tindak Lanjut Catatan Perbaikan Terhadap Perumusan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	36
Tabel 2.8	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	37
Tabel 2.9	Hasil Pemetaan Perubahan Nomenklatur dan Kodefikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	2
Gambar 2.1.	Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	15
Gambar 2.2.	Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Setelah Evaluasi SAKIP Tahun 2022	16
Gambar 2.3.	Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Setelah Evaluasi SAKIP Tahun 2023	17

BAB I

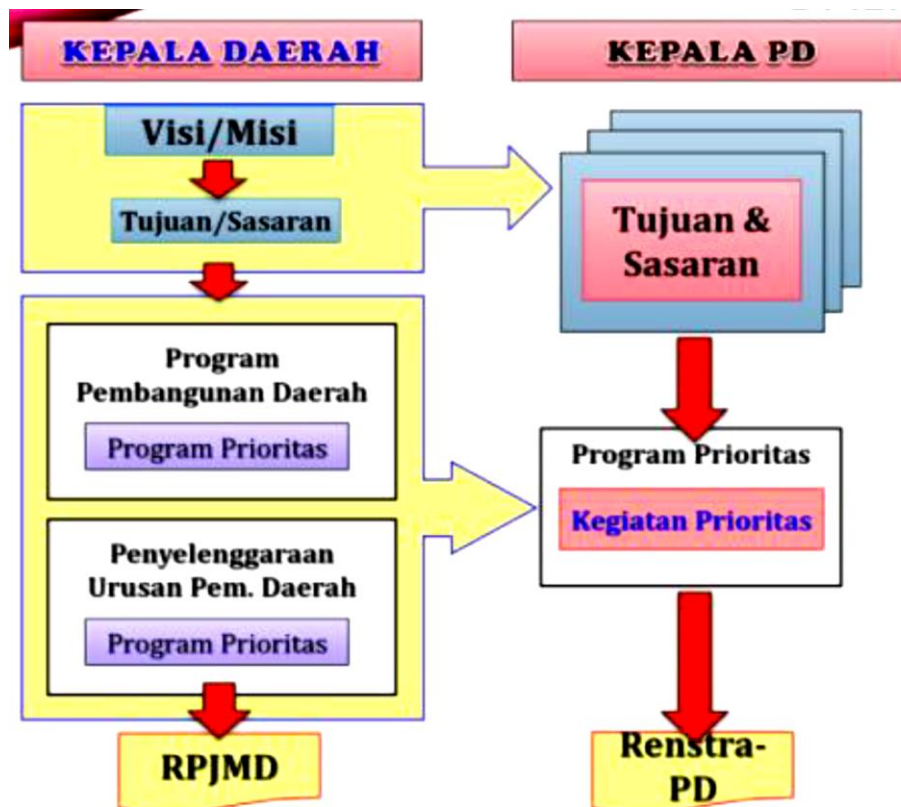
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan bagi sebuah organisasi/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Keberhasilan pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat yang bersifat *bottom up planning* dengan fakta dan kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis.

Kewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menyatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun suatu dokumen Rencana Strategis untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bersifat indikatif dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Diperjelas menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (pasal 1 angka 29 dan pasal 23 ayat 1).



Gambar 1.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
 Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017, Diolah 2021

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 telah mengalami beberapa kali penyesuaian sasaran strategis dan indikator sasaran jangka menengah pelayanan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023.

Dan seiring dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single code base* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian pada Bab VI dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang memiliki subtansi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tugas pokok fungsi serta kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Pasal 270 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota”. Salah satu bentuk pengendalian dan evaluasi adalah dilakukannya

evaluasi terhadap Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021-2024.

1.2. Landasan Hukum

Evaluasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 merujuk dan berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
16. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Nomor 000.5.3.1/284/Disnakertrans tanggal 24 April 2024, Hal Permohonan Evaluasi dan Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026;
17. Surat Sekretariat Daerah Nomor 000.7.2.2/BAPPEDA-PPEPD/503/2024 tanggal 19 Juni 2024, Hal Penyusunan dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Evaluasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2024 adalah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu.

Tujuan penyusunan Evaluasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2024 antara lain:

1. Memastikan indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disusun, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;

2. Memperoleh *baseline* data dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 untuk dukungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Evaluasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2021-2024 serta sistematika penulisan:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS AKHIR PERIODE

Memuat tentang hasil capaian target kinerja indikator tujuan, sasaran dan anggaran rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana pada ruang lingkup evaluasi:

- 2.1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra
- 2.2. Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Yang Dijadikan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra
- 2.4. Catatan Perbaikan Terhadap Perumusan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Memuat hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja indikator tujuan dan sasaran dan anggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memuat kesimpulan terhadap hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja indikator sasaran rencana strategis sebagai rekomendasi untuk penyusunan dokumen rencana strategis berikutnya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS

AKHIR PERIODE

Evaluasi terhadap rencana strategis perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, dimulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan rencana dan setelah rencana tersebut dilaksanakan. Penerapan evaluasi rencana strategis dibagi ke dalam tiga kelompok besar yakni evaluasi terhadap kebijakan rencana strategis, evaluasi terhadap indikator kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana strategis.

2.1. Evaluasi Terhadap Kebijakan Rencana Strategis

Evaluasi terhadap kebijakan rencana strategis (dokumen perencanaan yang ditetapkan) merupakan evaluasi awal yang dilakukan terhadap alur pikir ketika memformulasikan atau mendesain kebijakan rencana strategis yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, penetapan indikator kinerja daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pelaksanaan evaluasi awal kebijakan rencana strategis menggunakan model logis (*logic model*) maupun kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tepat. Pedoman tersebut mengarahkan perangkat daerah untuk membangun model berpikir logis yang benar dalam rangka mendapatkan kinerja organisasi yang dijabarkan secara baik kepada kinerja individu, serta desain strategi/program/kegiatan yang tepat sasaran. Sementara untuk evaluasi terhadap indikator kinerja digunakan pendekatan SMART yakni *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Realistic* (realistis), *Time-bound* (terikat waktu) yang berupaya untuk menciptakan sasaran yang jelas dan fokus dengan kriteria penilaian yang obyektif.

Pendekatan SMART diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi serta membantu Perangkat Daerah dalam mencapai hasil yang lebih terukur dan terstruktur. Untuk pendanaan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan pendekatan hasil analisa kebutuhan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis periode tahun 2021-2024, aspek yang menjadi perhatian antara lain:

1. Apakah visi dan misi Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis menunjang visi dan misi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
2. Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah?
3. Apakah strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten pada urusan terkait?
4. Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten terkait dengan urusan yang ditetapkan?
5. Apakah tujuan dan sasaran program serta pendanaan indikatif dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten?

Tabel 2.1. *Checklist* Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Periode Renstra 2021-2024 (Formulir E.73)

RPJMD Kabupaten Bengkulu	RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
Visi dan Misi	Visi dan Misi	√				
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran	√				
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan	√				
Penetapan Indikator Kinerja	Penetapan Indikator Kinerja	√				
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif	√				

2.2. Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Yang Dijadikan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program, kegiatan dan sub kegiatan. Indikator kinerja harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu (SMART). Selain itu Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan

memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu ditetapkan oleh pimpinan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi. Evaluasi kinerja secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur pencapaian target dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam konteks Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkalis umumnya mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Penempatan tenaga kerja: jumlah penempatan tenaga kerja lokal dan luar daerah dan tingkat keberhasilan penempatan;

2. Pelatihan kerja: jumlah peserta pelatihan, jenis pelatihan yang diselenggarakan, relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, dan tingkat penyerapan lulusan pelatihan;
3. Hubungan industrial: jumlah perselisihan hubungan industrial yang terjadi, tingkat penyelesaian perselisihan, dan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
4. Transmigrasi: perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.

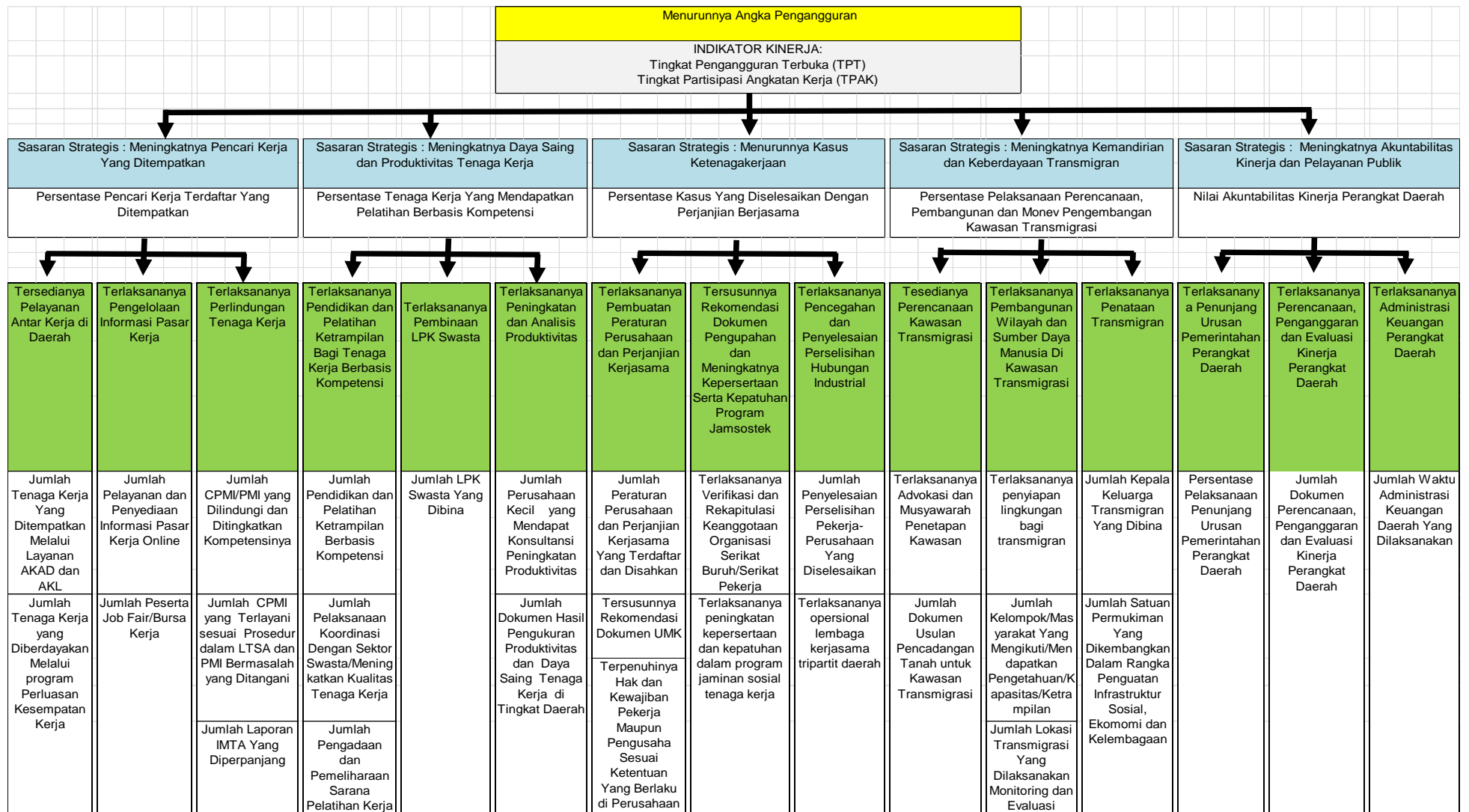
Dalam melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang dijadikan Perjanjian Kinerja beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Relevansi Indikator Kinerja Utama (IKU):
 - a. Apakah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan menunjang pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD?
 - b. Apakah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sudah relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi?
2. SMART: apakah indikator kinerja yang digunakan sudah memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu?
3. Ketersediaan data: apakah data yang diperlukan untuk evaluasi tersedia dan akurat?
4. Metode pengukuran: apakah metode pengukuran yang digunakan sudah tepat dan obyektif?
5. Kesenambungan indikator kinerja: apakah target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan indikator kinerja setiap tahunnya?

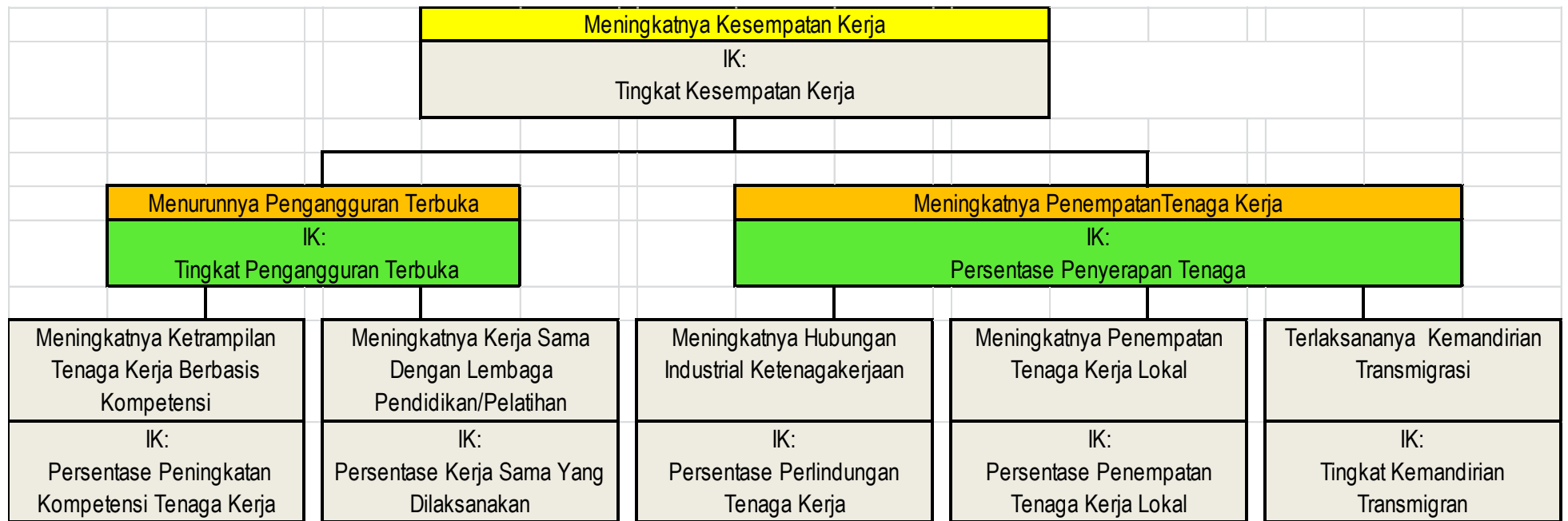
Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Yang Dijadikan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2021-2024

Uraian	Ya	Tidak	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
1	2a	2b	3	4	5
Relevansi	√				
SMART	√				
Ketersediaan Data	√				
Metode Pengukuran	√				
Kesinambungan indikator kinerja		√	Penyesuaian indikator kinerja	Perubahan indikator kinerja pada level Ess. 2, 3 dan JF	Telah selesai dilakukan perbaikan PK pada level Ess.2, 3 dan JF pada bulan Juli 2024

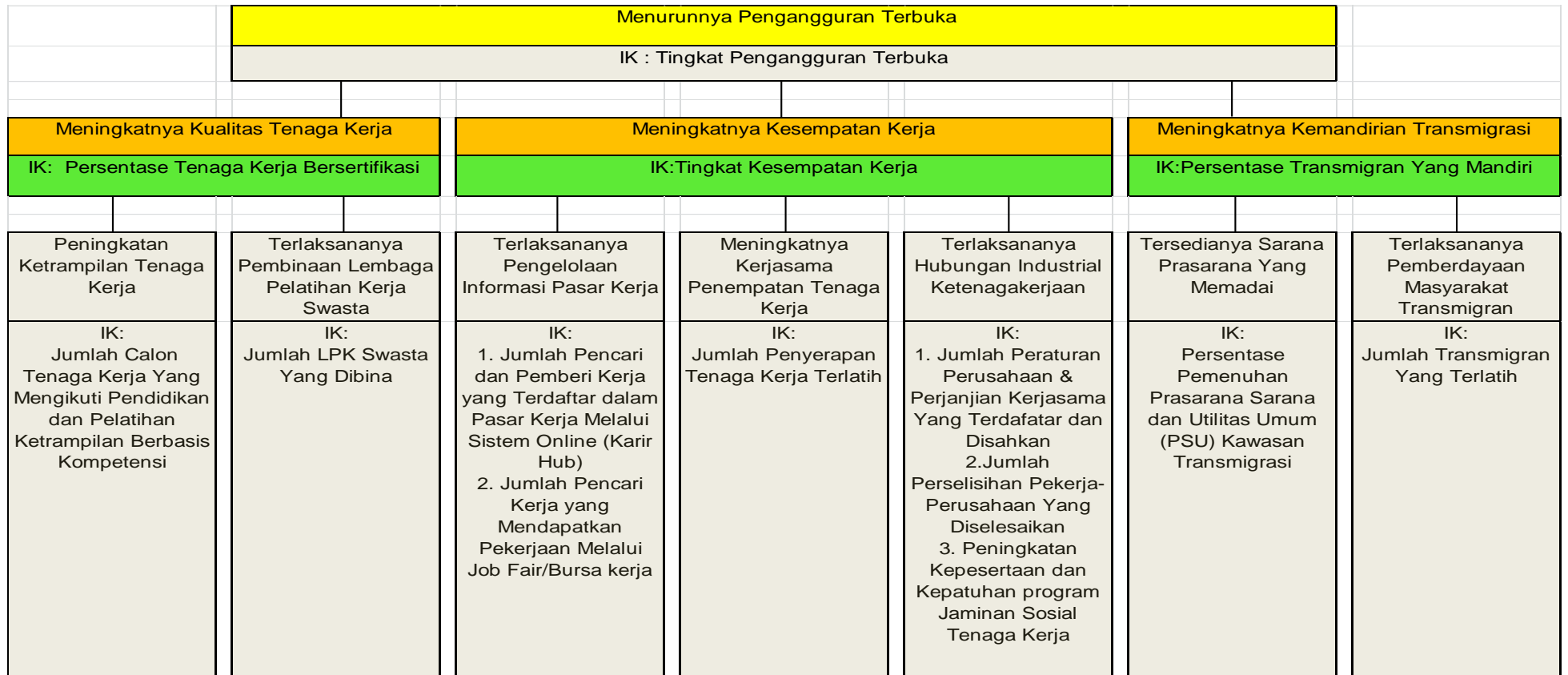
Indikator kinerja yang dilakukan penyesuaian merupakan hasil penyesuaian Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Tim SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, yang semula sasaran strategisnya adalah "Menurunnya Angka Pengangguran" dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berubah menjadi "Meningkatnya Kesempatan Kerja" sebagai sasaran strategisnya dengan indikator kinerja Tingkat Kesempatan Kerja. Dengan adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis maka indikator kinerja pada level eselon III, IV maupun Jabatan Fungsional juga mengalami penyesuaian. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 2.3.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Setelah Evaluasi SAKIP Tahun 2022



Gambar 2.3 Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Setelah Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 2.3. Matrik Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021				Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2022-2023						Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2024			
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)		Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	
		(%)				2022	2023	2022	2023			(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Menurunnya Angka Pengangguran	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	36,89	66,76	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	95	96	92,82	92,91	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,03
	2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,15	6,63									

2.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis

Evaluasi terhadap hasil rencana strategis (Renstra) merupakan proses sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis telah tercapai. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui efektivitas strategi yang telah dijalankan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil langkah-langkah korektif untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi.

Evaluasi terhadap hasil rencana strategis (Renstra) berpedoman pada perbandingan antara rencana rencana strategis (Renstra) dengan pelaksanaan rencana strategis (Renstra) yang dilakukan dengan cara telaahan terhadap:

1. Realisasi capaian indikator dan target kinerja yang mengacu pada sasaran strategis;
2. Realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas;
3. Rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja *outcome*/hasil program prioritas;
5. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran kedepan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap hasil rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis periode tahun 2021-2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4 (formulir E.80).

Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Periode Tahun 2021-2024 (Formulir E.80)

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc anaan	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)								Unit Penang gung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4	5	6		7		8		9		10		12		13		14		15		17		18		19		20		22
1.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9%	8,75%	2.785.579.791	9%	2.563.857.866	8,54%	2.605.525.647	8,44%	2.649.127.698	8,54%	2.683.901.747	6,63%	1.349.831.559	7,18%	5.441.178.049	7,09%	7.688.603.668	-	4.788.861.785	73,67%	52,65%	84,07%	208,83%	84,00%	290,23%	-	178%	Disnakertrans
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,21%	68,30%	2.785.579.791	66,21%	2.563.857.866	66,22%	2.605.525.647	67,18%	2.649.127.698	67,29%	2.683.901.747	43,95%	1.349.831.559	40,44%	5.441.178.049	37,04%	7.688.603.668	-	4.788.861.785	66,38%	52,65%	61,07%	208,83%	55,14%	290,23%	-	178%	Disnakertrans
2.	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan	Persentase pencari kerja terdaftar	95%	97%	260.378.914	95%	233.804.127	95%	240.995.740	96%	245.170.405	96%	248.499.835	93,37%	237.902.700	92,82%	356.179.274	92,91%	279.741.300	-	182.567.306	98,28%	101,75%	97,71%	147,79%	96,78%	114,10%	-	73%	Disnakertrans
2.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Bengkulu	75%	90%	260.378.914	75%	233.804.127	80%	240.995.740	83%	245.170.405	85%	248.499.835	60,00%	237.902.700	70,00%	356.179.274	65,00%	279.741.300	70,00%	182.567.306	80,00%	101,75%	87,50%	147,79%	78,31%	114,10%	82,35%	73%	Disnakertrans
2.1.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	100%	260.378.914	100%	233.804.127	100%	240.995.740	100%	245.170.405	100%	248.499.835	100%	237.902.700	100%	356.179.274	100%	279.741.300	75,00%	182.567.306	100%	101,75%	100%	147,79%	100%	114,10%	75,00%	73,47%	Disnakertrans
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	143.490.574	1 Dokumen	118.354.127	1 Dokumen	124.107.400	1 Dokumen	128.282.065	1 Dokumen	131.611.495	100%	237.902.700	5000 orang	257.939.274	1433 Orang	103.844.400	1540 Orang	95.265.237	100%	201%	#VALUE!	207,84%	#VALUE!	80,95%	#VALUE!	72,40%	Disnakertrans
	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Peserta Job Fair/Bursa Kerja	40 Peserta	40 Peserta	116.888.340	40 Peserta	115.450.000	40 Peserta	116.888.340	40 Peserta	116.888.340	40 Peserta	116.888.340	0	0	40 perusahaan	98.240.000	100 orang	175.896.900	0	87.282.069	0	-	100%	84,05%	250%	150,48%	0	74,67%	Disnakertrans

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc anaan		Target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)								Unit Penang g Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
3.	Meningkat nya Daya Saing dan Produktivita s Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatk an pelatih an berbasis kompetensi	100%	100%	1.599.052.585	100%	1.469.603.860	100%	1.482.753.541	100%	1.507.801.527	100%	1.527.778.109	100%	717.598.959	100%	2.896.195.799	100%	1.420.890.324	0	258.057.700	100%	48,83%	100%	195,33%	100%	94,24%	0	16,89%	Disnaker trans
3.1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivita s Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kerja Dengan Sertifikasi Kompetensi di Kabupaten Bengkalis	10%	35%	1.599.052.585	10%	1.469.603.860	15%	1.482.753.541	20%	1.507.801.527	25%	1.527.778.109	10,00%	717.598.959	15,00%	2.896.195.799	15,00%	1.420.890.324	0	258.057.700	100%	48,83%	100%	195,33%	75,00%	94,24%	0	16,89%	Disnaker trans
3.1.1	Kegiatan Pelaksanaa n Pelatihan berdasarka n Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarka n Unit Kompetensi	100%	100%	1.326.709.585	100%	1.259.254.860	100%	1.272.404.541	100%	1.259.359.986	100%	1.269.336.568	100%	717.598.959	100%	2.787.615.299	100%	1.223.956.324	20%	97.064.800	100%	56,99%	100%	219%	100%	97,19%	20,00%	7,65%	Disnaker trans
	Proses Pelaksanaa n Pendidika n dan Pelatihan Keterampil an bagi Pencari Kerja Berdasarka n Klaster Kompetensi	Jumlah pelaksana n pelatih an berbasis kompetensi	100 Orang	375 Orang	1.128.416.585	100 Orang	1.060.961.860	225 Orang	1.074.111.541	250 Orang	1.061.066.986	250 Orang	1.071.043.568	55 orang	717.598.959	304 orang	2.787.615.299	80 orang	1.003.531.734	0	32.955.000	55,00%	67,64%	135,11%	259,53%	32,00%	94,58%	0,00%	3,08%	Disnaker trans
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta / meningkat kan kualitas tenaga kerja Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pelaksana n koordina si dengan sektor swasta / meningkat kan kualitas tenaga kerja	2 Kegiatan	2 Kegiatan	75.750.000	2 Kegiatan	75.750.000	2 Kegiatan	75.750.000	2 Kegiatan	75.750.000	2 Kegiatan	75.750.000	0	0	0	0	4 lembaga	102.724.690	2 lembaga	55.494.300	0	-	0	-	#VALUE!	135,61%	100%	73%	Disnaker trans
	Pengadaan Sarana Pelatihan dan Pemelihara an Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengada an dan Pemelihara an Sarana Pelatihan Kerja	1 Paket	1 Paket	122.543.000	1 Paket	122.543.000	1 Paket	122.543.000	1 Paket	122.543.000	1 Paket	122.543.000	0	0	0	0	10 unit	117.699.900	0	8.615.500	0	-	0	-	#VALUE!	96,05%	0%	7,03%	Disnaker trans

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian n Pada Awal Tahun Perenc anaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan								Target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)								Unit Penang gung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
				7		8		9		10		12		13		14		15		17		18		19		20										
3.1.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	100%	155.600.000	100%	105.225.000	100%	105.225.000	100%	135.997.541	100%	145.997.541	0%	0%	100%	108.580.500	100%	102.233.300	100%	89.398.200	0%	0%	100%	103%	100%	75%	100%	61,23%	Disnakertrans						
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	12 LPK	12 LPK	155.600.000	12 LPK	105.225.000	12 LPK	105.225.000	12 LPK	135.997.541	12 LPK	145.997.541	0	0	14 LPK	108.580.500	9 lembaga	102.233.300	10 lembaga	89.398.200	0	-	116,67%	103,19%	75,00%	75,17%	83,33%	61,23%	Disnakertrans						
3.1.3	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	100%	100%	116.743.000	100%	105.124.000	100%	105.124.000	100%	112.444.000	100%	112.444.000	0	-	0	-	100%	94.700.700	100%	71.594.700	0	-	0	0	100%	84,22%	100%	63,67%	Disnakertrans						
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	2 Perusahaan	6 Perusahaan	116.743.000	2 Perusahaan	105.124.000	2 Perusahaan	105.124.000	4 Perusahaan	112.444.000	4 Perusahaan	112.444.000	0	0	0	0	4 Perusahaan	94.700.700	4 Perusahaan	71.594.700	0	-	0	0	100%	84,22%	100%	63,67%	Disnakertrans						
4.	Menurunkan kasus ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	23%	29%	413.074.146	23%	380.711.965	24%	383.999.385	25%	390.261.382	27%	395.255.527	20,00%	394.329.900	20,00%	1.868.643.340	20,00%	5.623.680.300	10,00%	4.212.795.090	86,96%	103,58%	83,33%	486,63%	80,00%	1441,00%	37,04%	1065,84%	Disnakertrans						
4.1	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Bengkalis	86%	100%	413.074.146	86%	380.711.965	90%	383.999.385	93%	390.261.382	95%	395.255.527	82,00%	394.329.900	82,00%	1.868.643.340	80,00%	5.623.680.300	70,00%	4.212.795.090	95,35%	103,58%	91,11%	486,63%	86,02%	1441,00%	73,68%	1066%	Disnakertrans						
4.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	216.998.000	100%	209.988.000	100%	216.998.000	100%	216.998.000	100%	216.998.000	100%	119.638.100	100%	1.297.454.700	100%	5.208.098.800	70,00%	239.506.554	100%	100%	100%	598%	100%	2400,07%	70,00%	110%	Disnakertrans						
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang di sahkan	20 Dokumen	45 Dokumen	74.998.000	20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		25 Dokumen		30 Dokumen		12 dokumen		21 perusahaan		11 perusahaan		150%	79,53%	60,00%						Disnakertrans						
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Honor Operator Komputer dalam 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	74.998.000	12 Bulan	74.998.000	12 Bulan	74.998.000	12 Bulan	74.998.000	12 Bulan	59.648.100	12 bulan	88.897.600		83.020.200		52.394.778	100%		100,00%	118,53%	#VALUE!	110,70%	#VALUE!	69,86%	Disnakertrans						

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc anaan	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)								Unit Penang gung Jawab				
				2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22											
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan Yang Terdftar	20 Dokume n	20 Dokume n	67.000.000	20 Dokume n	74.990.000	20 Dokume n	67.000.000	20 Dokume n	67.000.000	20 Dokume n	67.000.000	30 dokume n	59.990.000	4 perusah aan	91.104.800	1 perusah aan	67.720.200	5 perusah aan	46.266.396	150%	80,00%	20,00%								Disnaker trans
		Jumlah Honor Operator Komputer dalam 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	74.990.000	12 Bulan	67.000.000	12 Bulan	67.000.000	12 Bulan	67.000.000	12 Bulan	59.990.000	12 Bulan	91.104.800	12 Bulan	67.720.200	12 Bulan	46.266.396	100%	100,00%	135,98%	#VALUE!	101,07%	#VALUE!	69,05%			Disnaker trans	
	Penyeleng araan Permdataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupaha n	Tersusunnya Rekomenda si Dokumen UMK	1 Dokume n	1 Dokume n	75.000.000	1 Dokume n	60.000.000	1 Dokume n	75.000.000	1 Dokume n	75.000.000	1 Dokume n	75.000.000	0	-	1 dokume n	1.117.452.300	1 Laporan	5.057.358.400	0	140.845.380	0	0,00%	100,00%	1489,94%	100,00%	6743,14%	0	188%		Disnaker trans	
4.1.2	Pencegaha n dan Penyelesai an Perselisihan Hubungan Industrial, M ogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencegaha n dan Penyelesai an Perselisihan Hubungan Industrial, M ogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	196.076.146	100%	170.723.965	100%	167.001.385	100%	173.263.382	100%	178.257.527	100%	274.691.800	100%	571.188.640	100%	415.581.500	70,00%	3.973.288.536	100%	160,90%	100%	342,03%	100%	239,86%	70,00%	2229%		Disnaker trans	
	Pencegaha n Perselisihan Hubungan Industrial, M ogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/B erdampak pada Kepentinga n di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan di cegah	0%	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 perkara	162.083.200	6 perkara	36.607.612	0	0	0	0	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		Disnaker trans	

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)								Unit Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Model Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan	25 Kasus	40 Kasus	120.334.276	25 Kasus	108.566.000	30 Kasus	113.833.420	30 Kasus	110.326.000	35 Kasus	111.080.000	30 dokumen	102.036.000	19 kasus	301.924.140	24 perkara	138.480.100	5 perkara	78.712.751	120%	93,99%	63,33%	265,23%	80,00%	125,52%	14,29%	70,86%	Disnakertrans
	Penyelenggaraan Vertikalisasi dan Rekapitulasi Keanggotaan organisasi serikat pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terlaksananya vertikalisasi dan rekapitulasi keanggotaan organisasi serikat/buruh/serikat kerja	20 Perusahaan	85 Perusahaan	9.500.000	20 Perusahaan	9.770.000	20 Perusahaan	4.770.000	30 Perusahaan	5.754.000	45 Perusahaan	5.754.000	0	-	0	-	20 Asosiasi serikat kerja	80.125.600	1 Asosiasi	43.199.226	-	-	0	0	#VALUE!	13,9252	#VALUE!	751%	Disnakertrans
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya operasional lembaga kerjasama tripartit daerah	2 Pertemuan	6 Pertemuan	55.921.385	2 Pertemuan	43.127.965	4 Pertemuan	43.127.965	6 Pertemuan	53.921.385	6 Pertemuan	55.921.385	4 dokumen	172.655.800	3 pertemuan	269.264.500	1 pertemuan	196.975.800	1 lembaga	124.514.360	#VALUE!	400,33%	75,00%	624,34%	16,67%	365,30%	#VALUE!	223%	Disnakertrans
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya peningkatan kepesertaan dan kepatuhan dalam program jaminan sosial tenaga kerja	20 Perusahaan	85 Perusahaan	10.320.485	20 Perusahaan	9.270.000	20 Perusahaan	5.270.000	30 Perusahaan	3.261.997	45 Perusahaan	5.502.142	0	-	0	-	0	-	34000 orang	3.726.862.199	0	-	0	-	0	0,00%	#VALUE!	67735%	Disnakertrans

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perenc anaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)							
						2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5.	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan transmigrasi	Persentase pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi	NA	100%	100.000.000	NA	99.025.949	100%	113.777.596	100%	115.633.002	100%	117.112.749	0	-	65,00%	197.308.286	75,50%	143.456.159	85,00%	92.187.883	0	0	65%	173,42%	75,50%	124,06%	85,00%	78,72%
5.1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100%	100%	100.000.000	100%	99.025.949	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	0	-	65,00%	197.308.286	75,50%	143.456.159	85,00%	92.187.883	0	0	65%	197,31%	75,50%	143,46%	85,00%	92,19%
5.1.1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	100%	100%	100.000.000	100%	99.025.949	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	0	-	65,00%	197.308.286	75,50%	143.456.159	85,00%	92.187.883	-	0	65%	197,31%	75,50%	143,46%	85,00%	92,19%
	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	1	100.000.000	1	99.025.949	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	0	-	1	197.308.286	1	143.456.159	0	92.187.883	-	0	100%	197,31%	100%	143,46%	0	92,19%
5.2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	NA	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	-	-	100%	77.840.800	100%	138.808.600	23,00%	26.991.006	-	0	100%	129,73%	100%	231,35%	23,00%	44,99%
5.2.1	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya penataan persebaran penduduk dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	NA	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	0	-	100%	77.840.800	100%	138.808.600	23,00%	26.991.006	0	0	100%	129,73%	100,00%	231,35%	23,00%	44,99%
	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat Yang Mengikuti/ Mendapatkan Pengetahuan/ Kapasitas/ Ketrampilan	20	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	-	-	16	77.840.800	16	138.808.600	-	26.991.006	-	0	80,00%	129,73%	80,00%	231,35%	0,00%	44,99%

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian n Pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)								Unit Penangg ung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4	5	6		7		8		9		10		12		13		14		15		17		18		19		20		22
6.	Terlaksananya perencanaan tenaga kerja daerah	Persentase ketersediaan data ketenagakerjaan	55%	93%	413.074.146	55%	380.711.965	85%	383.999.385	87%	390.261.382	90%	395.255.527	-	-	75,00%	122.851.350	70,00%	220.835.585	50,00%	43.253.806	-	0	88,24%	31,99%	80,46%	56,59%	55,56%	10,94%	Disnakertrans
6.1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Ketersediaan Data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenagakerjaan se Kabupaten Bengkulu	55%	93%	413.074.146	55%	380.711.965	85%	383.999.385	87%	390.261.382	90%	395.255.527	-	-	75,00%	122.851.350	70,00%	220.835.585	50,00%	43.253.806	-	0	88,24%	31,99%	80,46%	56,59%	55,56%	10,94%	Disnakertrans
6.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah penyusunan Rencana Tenaga Kerja	25%	40%	413.074.146	25%	380.711.965	25%	383.999.385	30%	390.261.382	35%	395.255.527	0	-	30,00%	122.851.350	30,00%	220.835.585	10,00%	43.253.806	0,00%	0,00%	120,00%	31,99%	100,00%	56,59%	28,57%	10,94%	Disnakertrans
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	1	240.125.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	230.500.000	1	233.250.000	0	-	1 dokume n	122.851.350	1 dokume n	220.835.585	-	20.426.643	0,00%	0,00%	100%	49,14%	100%	95,81%	0	8,76%	Disnakertrans
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun RTK Mikro	50	80	172.949.146	50	130.711.965	50	133.999.385	75	159.761.382	75	162.005.527	0	-	-	0	-	-	-	22.827.163	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	14,09%	Disnakertrans

Tabel 2.5. Matrik Capaian Program

No.	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rata-rata Realisasi (%)	Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)								Rata-rata Rasio Capaian (%)
					2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024			2021		2022		2023		2024		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
2.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Bengkalis	90%	260.378.914	75%	233.804.127	80%	240.995.740	83%	245.170.405	85%	248.499.835	60,00%	237.902.700	70,00%	356.179.274	65,00%	279.741.300	70,00%	182.567.306	66,25%	80,00%	101,75%	87,50%	147,79%	78,31%	114,10%	82,35%	73%	82,04%
3.1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kerja Dengan Sertifikasi Kompetensi	35%	1.599.052.585	10%	1.469.603.860	15%	1.482.753.541	20%	1.507.801.527	25%	1.527.778.109	10,00%	717.598.959	15,00%	2.896.195.799	15,00%	1.420.890.324	0	258.057.700	10,00%	100%	48,83%	100%	195,33%	75,00%	94,24%	0	16,89%	68,75%
4.1	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Bengkalis	100%	413.074.146	86%	380.711.965	90%	383.999.385	93%	390.261.382	95%	395.255.527	82,00%	394.329.900	82,00%	1.868.643.340	80,00%	5.623.680.300	70,00%	4.212.795.090	78,50%	95,35%	103,58%	91,11%	486,63%	86,02%	1441,00%	73,68%	1066%	86,54%
5.1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100%	100.000.000	100%	99.025.949	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	0	-	65,00%	197.308.286	75,50%	143.456.159	85,00%	92.187.883	56,38%	0	0	65%	197,31%	75,50%	143,46%	85,00%	92,19%	56,38%
5.2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	0	-	100%	77.840.800	100%	138.808.600	23,00%	26.991.006	55,75%	0	0	100%	129,73%	100%	231,35%	23,00%	44,99%	55,75%
6.1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Ketersediaan Data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenagakerjaan se Kabupaten Bengkalis	93%	413.074.146	55%	380.711.965	85%	383.999.385	87%	390.261.382	90%	395.255.527	0	-	75,00%	122.851.350	70,00%	220.835.585	50,00%	43.253.806	48,75%	0	0	88,24%	31,99%	80,46%	56,59%	55,56%	10,94%	56,06%

Dari matrik capaian program dapat dijelaskan bahwa rata-rata realisasi dan rata-rata capaian rasio pada masing-masing program pendukung indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis pada tahun ke-4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja, rata-rata realisasi sebesar 66,25% dan rata-rata rasio capaian 82,04%. Angka tersebut menunjukkan bahwa besaran tenaga kerja yang ditempatkan di Kabupaten Bengkalis masih belum mampu memenuhi harapan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sistem pendidikan yang belum *link and match* atau masih *output oriented* dan belum *job oriented*, belum rapinya sistem inventarisasi data masyarakat yang telah mendapatkan pekerjaan dari proses pendaftaran Kartu Pencari Kerja (AK1), belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah terkait besaran tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, rata-rata realisasi sebesar 10% dan rata-rata rasio capaian sebesar 68,75%. Belum maksimalnya nilai rata-rata realisasi maupun rata-rata rasio capaian dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 kegiatan pelatihan berbasis kompetensi belum dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya triwulan ke tiga selain keterbatasan jumlah instruktur yang dimiliki oleh Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal;
3. Program Hubungan Industrial, rata-rata realisasi sebesar 78,50% dan rata-rata rasio capaian sebesar 86,54%. Jumlah kasus yang

dilaporkan dan diselesaikan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis menjadi pertimbangan khusus dalam perhitungan realisasi kinerja pada Program Hubungan Industrial selain pertimbangan keterbatasan jumlah mediator yang ada saat ini;

4. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, rata-rata realisasi sebesar 56,38% dan rata-rata rasio capaian sebesar 56,38%. Kegiatan yang baru dilaksanakan pada periode tahun ke dua Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 perlu dijadikan pertimbangan terhadap kurang optimalnya nilai realisasi maupun capaian kinerja dari program bersangkutan. Tahun 2024 proses legalitas status lahan kawasan transmigrasi yang menjadi perhatian utama program ini telah sampai pada tahap tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk dapat melakukan pengukuran ulang lahan yang ada dan pengesahan Status Hak Milik lahan bagi masyarakat transmigrasi yang ada di Desa Cingam maupun Desa Makeruh Kecamatan Rupid;
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, rata-rata realisasi sebesar 55,75% dan rata-rata rasio capaian sebesar 55,75%. Seperti halnya dengan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi kegiatan yang baru dilaksanakan pada periode tahun ke dua Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta rasionalisasi anggaran kegiatan pada tahun 2024 menjadi faktor kurang optimalnya nilai realisasi maupun capaian kinerja dari program bersangkutan. Perlu dijadikan perhatian utama terkait kegiatan pembinaan yang sekiranya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat transmigran di Desa Cingam maupun Desa Makeruh Kecamatan Rupid yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dan *stakeholdersnya*;

6. Program Perencanaan Tenaga Kerja, rata-rata realisasi sebesar 48,75% dan rata-rata rasio capaian sebesar 56,06%. Tidak berbeda dengan program pada urusan transmigrasi, program perencanaan tenaga kerja juga baru dilaksanakan pada periode tahun ke dua Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana tenaga kerja sehingga realisasi maupun capaian belum dapat dicapai secara optimal.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi dan rasio capaian program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis masih belum dapat memenuhi harapan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Hal tersebut dimungkinkan terjadi dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, belum optimalnya monitoring untuk memastikan berjalannya program sesuai rencana, belum optimalnya evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemajuan dan identifikasi permasalahan pelaksanaan program, jikapun telah dilakukan evaluasi namun hasil evaluasi tidak menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret, adanya perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan program.

2.4. Catatan Perbaikan Terhadap Perumusan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Karenanya seluruh instansi pemerintah, badan dan lembaga baik pusat maupun daerah sesuai tugas dan fungsinya harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Perumusan yang tepat dan efektif atas akuntabilitas kinerja ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun berjalan. Pelaporan pengukuran kinerja sendiri berkaitan dengan suatu proses yang dinamakan pengelolaan pencapaian (*managing of result*). Proses tersebut timbul terhadap tuntutan yang meningkat bahwa manajemen pemerintahan perlu memakai pendekatan yang sama dengan manajemen sektor swasta maupun organisasi nir laba lainnya. Proses yang dilakukan merupakan proses yang menggunakan pendekatan komprehensif untuk memfokuskan suatu organisasi terhadap misi, tujuan dan sasaran. Adapun prinsip-prinsip dasar akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Transparansi: informasi mengenai kinerja harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik;
2. Akuntabilitas: setiap pejabat dan pegawai bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya;

3. Efisiensi: penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;
4. Efektivitas: pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
5. Keadilan: perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terkait.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 66/KPTS/I/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis mendapat nilai 74,50 (tujuh puluh empat koma lima puluh) dengan kategori Predikat BB Interpretasi Sangat Baik dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Rincian Hasil Penilaian AKIP
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Predikat Nilai	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Ir	35,00	14,25	16,00
	Jumlah hasil evaluasi kinerja	100,00	73,65	74,50
	Nilai hasil evaluasi SAKIP		73,65	74,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB
	Interpretasi		Sangat Baik	Sangat Baik

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis:

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup rencana strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar, namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*);
2. Belum seluruh pegawai memahami, peduli, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan sehingga belum mampu untuk merumuskan, menetapkan perencanaan kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Capaian Kinerja Elektronik Kabupaten Bengkalis (SICAKEB) namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
2. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;

3. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktifitas dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah menyusun laporan kinerja dengan menyajikan realisasi kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dipublikasikan. Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Evaluasi pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan;
2. Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
3. Pemantauan rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberi alternatif perbaikan;
4. Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
5. Hasil evaluasi AKIP internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, Inspektorat Kabupaten Bengkalis merekomendasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis agar melakukan hal-hal antara lain:

1. Menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dalam rencana aksi atas kinerja;
2. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan mampu merumuskan, menetapkan perencanaan kinerja;
3. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
4. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*);
5. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja;
6. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya;
7. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi;
8. Memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan dalam hal evaluasi program;
9. Melaksanakan pemantauan rencana aksi atas kinerja dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberi alternatif perbaikan;
10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

11. Memanfaatkan hasil dari evaluasi AKIP internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Terhadap beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah selesai dilakukan tindak lanjut.

Tabel 2.7. Hasil Tindak Lanjut Catatan Perbaikan Terhadap Perumusan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Progres	%
1	2	3	4	5	6
1	Menggambarakan hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>) dalam rencana aksi atas kinerja	Perbaikan Rencana Aksi Kinerja	April-Juni 2024	Selesai	100
2	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan mampu merumuskan, menetapkan perencanaan kinerja	Rapat awal tahun	Januari 2024	Selesai	100
3	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Dalam proses evaluasi	Desember 2024	Proses	-
4	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mempengaruhi penyesuaian (<i>refocusing</i>)	Sebagai bahan dalam proses APBD-P	Juli 2024	Selesai	100
5	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktifitas dalam mencapai kinerja	Sebagai bahan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025	Desember 2024	Proses	80

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Progres	%
1	2	3	4	5	6
6	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	Melakukan perbaikan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja	Mei 2024	Selesai	100
7	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi	Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan	Januari - Desember 2024	Telah dilakukan Evaluasi Triwulan II	50
8	Memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan dalam hal evaluasi program	Melakukan perbaikan target kinerja Dalam Proses Penyusunan Renja 2025	Desember 2024	Proses	80
9	Melaksanakan pemantauan rencana aksi atas kinerja dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan	Melaksanakan rapat internal terkait evaluasi dan capaian rencana kinerja	Januari - Desember 2024	Proses	50
10	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Dari 10 poin rekomendasi 8 poin telah ditindaklanjuti	Desember 2024	Proses	80
11	Memanfaatkan hasil dari evaluasi AKIP internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Melaksanakan rapat internal	Desember 2024	Proses	50

Tabel 2.8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

No.	Komponen	Target			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai hasil evaluasi SAKIP	50	55	60	61,01	73,65	74,5
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	BB	BB

Dengan telah disahkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan pemetaan nomenklatur antara yang telah dicantumkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.9. Hasil Pemetaan Perubahan Nomenklatur dan Kodefikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2														2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2	07													2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persen					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2	07	01		
	2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persen				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	07	01	2.01	
	2	07	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	07	01	2.01	01
	2	07	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2	07	01	2.01	02

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE										
	2	07	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2	07	01	2.01	03	
	2	07	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD			2	07	01	2.01	04	
	2	07	01	2.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2	07	01	2.01	05	
	2	07	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2	07	01	2.01	06	
	2	07	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2	07	01	2.01	07	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN			
						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM		KODE		
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah admnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan dalam 12 bulan	Persen				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2	07	01	2.02	
	2	07	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan dalam 12 bulan	Persen	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2	07	01	2.02	01
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2	07	01	2.03	
	2	07	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Pengamanan Barang Milik Daerah	Orang	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2	07	01	2.03	02
	2	07	01	2.05		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen				Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2	07	01	2.05	
	2	07	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Yang Disediakan	Orang	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			2	07	01	2.05	02
	2	07	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Birtek Peraturan Perundang-undangan	Orang	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2	07	01	2.05	11

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				
						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM		KODE			
	2	07	01	2.06			Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persen				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		2	07	01	2.06	
	2	07	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2	07	01	2.06	01
	2	07	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2	07	01	2.06	02
	2	07	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2	07	01	2.06	04
	2	07	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2	07	01	2.06	05
	2	07	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	Media	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			2	07	01	2.06	06
	2	07	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2	07	01	2.06	09
	2	07	01	2.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Orang	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2	07	01	2.06	11

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE				RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM		KODE			
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2	07	01	2.07	
	2	07	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan diadakan	Unit	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2	07	01	2.07	02
	2	07	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Disediakan	Unit	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel			2	07	01	2.07	05
	2	07	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Jenis	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2	07	01	2.07	10
	2	07	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Persen				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	07	01	2.08	
	2	07	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Yang Disediakan	Lembar	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	07	01	2.08	01
	2	07	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Administrasi yang disediakan	Orang						2	07	01	2.08	01
	2	07	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2	07	01	2.08	02

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN					
						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM		KODE				
	2	07	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Dibayarkan	Orang	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2	07	01	2.08	04	
	2	07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam 12 bulan	Persen				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	07	01	2.09		
	2	07	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2	07	01	2.09	02	
	2	07	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2	07	01	2.09	06	
	2	07	01	2.09	09			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara	Unit	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2	07	01	2.09	09	
	2	07	01	2.09	10			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Terpelihara/ Direhabilitasi	Unit	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2	07	01	2.09	10	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN						
						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM		KODE					
	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Persentase Ketersediaan Data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenaga Kerjaan se Kabupaten Bengkalis	Persen					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2	07	02				
	2	07	02	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Persen				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		2	07	02	2.01			
	2	07	02	2.01	01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (skala kabupaten)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			2	07	02	2.01	0001		
	2	07	02	2.01	02			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	Orang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			2	07	02	2.01	0003		
	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kerja Dengan Sertifikasi Kompetensi di Kabupaten Bengkalis	Persen					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2	07	03				
	2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persen				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		2	07	03	2.01			
	2	07	03	2.01	01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	Pelatihan	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			2	07	03	2.01	0001		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE									
	2	07	03	2.01	02			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan sektor swasta / meningkatkan kualitas tenaga kerja	Kegiatan	Lembaga	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.		2	07	03	2.01	0002	
	2	07	03	2.01	03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Paket	Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota		2	07	03	2.01	0003	
	2	07	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persen				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		2	07	03	2.02		
	2	07	03	2.02	01		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	LPK	Lembaga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			2	07	03	2.02	0001	
	2	07	03	2.04			Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Persen				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		2	07	03	2.04		
	2	07	03	2.04	01		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			2	07	03	2.04	0001	
	2	07	03	2.05			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2	07	03	2.05		

BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN					
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE										
	2	07	03	2.05	01			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		2	07	03	2.05	0001		
	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
	2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persen				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		2	07	04	2.03		
	2	07	04	2.03	02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				2	07	04	2.03	0002	
	2	07	04	2.03	03		Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Peserta Job Fair/Bursa Kerja	Peserta	Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Job Fair /Bursa Kerja				2	07	04	2.03	0003	
	2	07	04	2.04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Yang Dilindungi					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			2	07	04	2.04		
	2	07	04	2.04	02		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	Orang	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				2	07	04	2.04	0002	
	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE				RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN							
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE								
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	07	05	2.01				
	2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang di sah kan	Dokumen	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan					2	07	05	2.01	0001			
	2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan Yang Terdaftar	Dokumen	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan					2	07	05	2.01	0002			
	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Permdataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tersusunnya Rekomendasi Dokumen UMK	Dokumen	Laporan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Permdataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					2	07	05	2.01	0003			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024						PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE													
	2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persen							Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota		2	07	05	2.02		
	2	07	05	2.02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan di cegah	Kasus	Perkara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2	07	05	2.02	0001	
	2	07	05	2.02	02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan	Kasus	Perkara	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota						2	07	05	2.02	0002	
	2	07	05	2.02	03		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Terlaksananya verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan organisasi serikat buruh/serikat kerja	Perusahaan	Asosiasi dan Serikat Pekerja	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						2	07	05	2.02	0003	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPENDINGR No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE									
	2	07	05	2.02	04			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional lembaga kerjasama tripartit daerah	Pertemuan	Lembaga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		2	07	05	2.02	0004	
	2	07	05	2.02	05			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya peningkatan kepersertaan dan kepatuhan dalam program jaminan sosial tenaga kerja	Perusahaan	Orang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		2	07	05	2.02	0005	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3														3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	32													3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
	3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persen				PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3	32	02			
	3	32	02	2.01			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persen				Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	3	32	02	2.01		
	3	32	02	2.01	04		Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi		Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi		3	32	02	2.01	0004	
	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persen				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3	32	03			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE					RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2024					PEMUTAKHIRANKEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE								
	3	32	03	2.01															
	3	32	03	2.01	06														
						Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya penataan persebaran penduduk dari 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Persen					Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
						Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat Yang Mengikuti/Mendapatkan Pengetahuan/Kapasitas/Ketrampilan	Orang	Orang	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Pelatihan Transmigrasi								

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja merupakan elemen kunci dalam memahami mengapa suatu individu, tim, atau organisasi mencapai atau tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal dan saling mempengaruhi. Faktor pendorong maupun faktor penghambat baik internal maupun eksternal pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, antara lain:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun bersangkutan adalah upaya agar target kinerja dapat tercapai. Koordinasi dan pemahaman tugas sangat diperlukan guna penyeimbangan pelaksanaan program dan kegiatan serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia serta integritas yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja untuk mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. Minimnya sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi belum didukung oleh keahlian atau kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program kegiatan khususnya pelatihan berbasis kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ketrampilan dan kompetensi calon pencari kerja di Kabupaten Bengkalis;
- c. Minimnya inisiatif dari masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam tertib administrasi proses pengurusan Kartu Calon Pencari Kerja yang dibuktikan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang

kembali melaporkan statusnya yang telah mendapatkan pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Masyarakat juga kurang aktif dalam mencari informasi terkait jenis dan jadwal kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang telah dibagikan ke berbagai akun sosial media sehingga menimbulkan pendapat bahwa pelatihan yang diselenggarakan hanya dikhususkan bagi sebagian masyarakat yang tentu saja informasi tersebut sangatlah tidak benar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis periode 2021-2023 dapat disimpulkan telah mengalami peningkatan perbaikan dari tahun ke tahun meskipun masih diperlukan perbaikan khususnya dari internal. Perubahan indikator kinerja sasaran strategis tidak menjadi kendala dalam rangka melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan ketenagakerjaan dan urusan pilihan yakni ketransmigrasian sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Beberapa kesimpulan yang diambil dari evaluasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 antara lain:

1. Adanya kesesuaian atau relevansi antara visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan, penetapan indikator kinerja, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta indikator kinerja Pemerintah Daerah, merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Adanya relevansi, memuat konsep SMART, terdapat ketersediaan data dan metode pengukuran pada indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis meskipun terdapat

ketidaksesuaian pada poin kesinambungan indikator kinerja namun telah dilakukan penyesuaian/perubahan indikator kinerja pada level eselon 2, 3 dan fungsional;

3. Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023 meningkat dari B menjadi BB.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjutnya antara lain:

1. Perlu ditingkatkan kemampuan merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja serta pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh jajaran dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
2. Perlu ditingkatkan inovasi dan kreatifitas seluruh jajaran dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah direncanakan;
3. Perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja;
4. Perlu dilakukan pendampingan yang intensif terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan perusahaan-perusahaan kecil dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya supaya dapat berkembang dan dapat berfungsi sebagai penyedia atau membuka lapangan pekerjaan;
5. Perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui pusat info kerja untuk memperluas penempatan tenaga kerja.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap evaluasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 antara lain:

1. Diperlukan penyesuaian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

2. Analisis mendalam terhadap indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan isu strategis rencana pembangunan daerah jangka menengah;
3. Penyusunan pohon kinerja berdasarkan isu strategis serta penetapan perjanjian kinerja hasil dari dialog kinerja pada semua level jabatan.



Bengkalis, 25 Oktober 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu

SALMAN ALFARISI, S.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820519 201102 1 001